

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Laporan Keuangan Sektor Publik

Dosen Pengampu:

Dr.Pujiati,S.Pd.,M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Oleh:
Kelompok 7

1. Fatria Irawan 2313031036

2. Raja Power Samosir 2313031054

KELAS B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Laporan Keuangan Sektor Publik” dengan tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai harapan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Pujiati,S.Pd.,M.Pd. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini

Selain itu, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 14 November 2025

Kelompok 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
2.1. Pengertian Laporan keuangan sektor publik	6
2.2. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.....	7
2.3. Karakteristik Laporan Keuangan Sektor Publik	9
2.4. Tantangan dalam Laporan Keuangan Sektor Publik.....	11
BAB III	14
PENUTUP.....	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
STUDI KASUS.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola anggaran negara, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan. Untuk melaksanakan seluruh tugas tersebut, dibutuhkan suatu sistem pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa pemerintah dan lembaga publik menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan pemerintah meningkat secara signifikan. Masyarakat menginginkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran, capaian kinerja, maupun pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Karena itu, laporan keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan public.

Seiring perkembangan regulasi, Indonesia telah menerapkan berbagai standar pelaporan keuangan seperti SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya standar tersebut, laporan keuangan diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta arus kas lembaga publik. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan governance dan integritas lembaga publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik?
2. Bagaimanakah Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik?
3. Bagaimanakah Karakteristik Laporan Keuangan Sektor Publik?
4. Bagaimanakah Tantangan dalam Laporan Keuangan Sektor Publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tentang Laporan Keuangan Sektor Publik ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik.
2. Mengetahui dan memahami Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.
3. Mengetahui dan memahami Karakteristik Laporan Keuangan Sektor Publik.
4. Mengetahui dan memahami Tantangan Dalam Laporan Keuangan Sektor Publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Laporan keuangan sektor publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban formal yang disusun oleh entitas pemerintah dan lembaga publik untuk menyajikan informasi secara sistematis mengenai seluruh aktivitas keuangan yang terjadi selama satu periode pelaporan. Informasi tersebut meliputi posisi aset dan kewajiban, kinerja anggaran, capaian operasional, arus kas, serta berbagai catatan dan pengungkapan yang diperlukan agar laporan tersebut dapat dipahami secara utuh. Laporan keuangan sektor publik tidak semata-mata menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme tata kelola pemerintahan (governance) yang bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Secara konseptual, laporan keuangan sektor publik merupakan instrumen akuntansi yang mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengguna laporan, seperti masyarakat, lembaga legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga pengawas internal, akademisi, donatur, hingga organisasi internasional. Informasi yang disajikan ini memiliki nilai strategis karena dapat memberikan gambaran apakah pemerintah telah mengelola anggaran sesuai kewenangannya, apakah program-program kerja berlangsung efektif, serta apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan sesuai ketentuan.

Keunikan laporan keuangan sektor publik terletak pada orientasinya yang tidak mengejar keuntungan (non-profit oriented), melainkan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan penyusunannya lebih luas daripada sekadar memenuhi persyaratan akuntansi; laporan keuangan menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui dari mana dana publik

berasal, bagaimana dana tersebut dialokasikan, serta apa saja hasil atau manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, laporan keuangan juga menjadi alat kontrol sosial yang memberi kesempatan kepada publik untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, penyusunan laporan keuangan sektor publik diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP berbasis akrual diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mencatat seluruh transaksi ekonomi, baik yang telah melibatkan kas maupun belum. Pendekatan akrual ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pemerintah sehingga pengguna laporan dapat menilai kesehatan fiskal secara komprehensif. SAP juga mengatur bahwa laporan keuangan harus mencakup berbagai komponen seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang menyeluruh, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi keuangan, kinerja pemerintah, serta capaian pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya publik.

Secara garis besar, laporan keuangan sektor publik memiliki tujuan yang lebih luas daripada laporan keuangan sektor privat. Hal ini karena sektor publik tidak mencari keuntungan, tetapi bertanggung jawab memberikan pelayanan publik serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, laporan keuangan

pemerintah memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Memberikan Akuntabilitas Publik (Public Accountability)

Tujuan paling mendasar dari laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dana yang dikelola pemerintah berasal dari pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan sumber daya publik lainnya. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan bagaimana dana tersebut digunakan.

Melalui laporan keuangan, publik dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja sesuai mandat, apakah anggaran digunakan secara efisien, serta apakah ada penyimpangan yang perlu diklarifikasi. Tanpa laporan keuangan, sistem demokrasi dan pengawasan publik akan kehilangan fondasi penting.

2. Menyediakan Informasi yang Relevan untuk Pengambilan Keputusan

Laporan keuangan sektor publik memberikan gambaran yang komprehensif tentang pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta arus kas pemerintah. Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak seperti DPR/DPRD, kementerian, BPK, Bappenas, dan instansi terkait untuk:

- merencanakan anggaran tahun berikutnya,
- menentukan prioritas pembangunan,
- mengevaluasi efektivitas program pemerintah,
- menilai tingkat keseimbangan fiskal,
- serta mengambil kebijakan makro ekonomi.

Dengan demikian, laporan keuangan berfungsi sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan strategis.

3. Menilai Kinerja Pemerintah Secara Menyeluruh

Laporan keuangan tidak hanya memuat angka, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan, efektivitas belanja, serta keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Melalui Laporan Operasional (LO), Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pengguna dapat menganalisis:

- apakah program berjalan efektif,
- apakah kegiatan mencapai output dan outcome yang direncanakan,
- apakah belanja dilakukan secara efisien,
- serta bagaimana dampak pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Dengan demikian, laporan keuangan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang objektif.

4. Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Transparansi merupakan prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan laporan keuangan yang terbuka, masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas dapat memantau penggunaan anggaran dan memastikan tidak ada penyalahgunaan atau manipulasi keuangan. Transparansi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
5. Memastikan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Laporan keuangan sektor publik bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti:
 - Undang-Undang Keuangan Negara,
 - Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
 - Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
 - peraturan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 Kesesuaian laporan keuangan dengan regulasi ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan opini audit.

2.3. Karakteristik Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan laporan keuangan sektor privat, karena entitas pemerintah tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pelayanan publik, pengelolaan dana masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan. Karakteristik ini merupakan dasar yang membedakan bagaimana laporan

keuangan disusun, disajikan, dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

1. Berorientasi pada Akuntabilitas Publik

Karakteristik paling mendasar dari laporan keuangan sektor publik adalah orientasinya pada akuntabilitas publik. Pemerintah mengelola dana yang berasal dari pajak, retribusi, hibah, dan sumber daya publik lain. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikelola telah digunakan secara tepat, sah, efektif, dan efisien. Akuntabilitas ini bukan hanya kepada pihak internal, melainkan kepada publik luas sebagai pemilik dana. Ini berbeda jauh dari sektor privat yang fokus pada akuntabilitas kepada pemilik modal atau investor.

2. Disusun Berdasarkan Regulasi (SAP dan Peraturan Keuangan Negara)

Laporan keuangan sektor publik wajib mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Undang-Undang Keuangan Negara, SPIP, serta sejumlah peraturan teknis lainnya. Regulasi tersebut bersifat mengikat (mandatory) sehingga format, komponen, dan metode penyajian laporan keuangan harus mengikuti pedoman resmi pemerintah. Hal ini berbeda dengan sektor privat yang menggunakan PSAK dan IFRS yang lebih bersifat prinsip (principle-based).

3. Tidak Berorientasi Laba (Non-Profit Orientation)

Entitas publik tidak bertujuan mencari keuntungan. Tujuan mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi negara. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak menilai laba atau rugi seperti di sektor privat, tetapi menilai surplus atau defisit anggaran, realisasi belanja, kinerja operasional, serta tingkat pencapaian pelayanan publik.

4. Fokus pada Pelayanan Publik dan Capaian Program

Karakteristik utama laporan keuangan sektor publik adalah penyajiannya yang berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan dan program pelayanan masyarakat. Berbagai laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) menunjukkan bagaimana kegiatan pemerintah berjalan dan apakah program-program

telah direalisasikan sesuai target. Dengan demikian, laporan keuangan juga mencerminkan kinerja program.

5. Menggunakan Basis Akrual dalam Pelaporan

SAP berbasis akrual mewajibkan pencatatan seluruh hak dan kewajiban pemerintah meskipun belum terjadi transaksi kas. Hal ini memberikan gambaran yang lebih lengkap, termasuk nilai aset negara, kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, beban operasional, dan pendapatan non-kas. Basis akrual meningkatkan kualitas informasi sehingga pengguna laporan dapat melihat kondisi fiskal yang sebenarnya.

6. Bersifat Transparan dan Bersedia untuk Diakses Publik

Transparansi merupakan karakteristik penting karena laporan keuangan sektor publik harus dapat diakses oleh publik guna memastikan keterbukaan atas penggunaan dana negara. Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membuka informasi keuangan kepada masyarakat agar terhindar dari kekhawatiran adanya penyimpangan anggaran, korupsi, atau pemborosan.

2.4. Tantangan dalam Laporan Keuangan Sektor Publik

Penyusunan laporan keuangan sektor publik menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari kompleksitas organisasi pemerintah, karakteristik pendanaan, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.

1. Keragaman dan Kompleksitas Kegiatan Pemerintahan

Kegiatan sektor publik mencakup berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial, keamanan, hingga administrasi pemerintahan. Setiap bidang memiliki pola anggaran, metode pelaporan, dan kebutuhan informasi yang berbeda. Kompleksitas ini membuat penyusunan laporan keuangan menjadi sulit, karena harus menyatukan berbagai jenis transaksi yang berbeda dalam satu format yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, program-program pemerintah

sering kali bersifat lintas instansi sehingga koordinasi pencatatan dan pelaporannya menambah tantangan tersendiri.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Akuntansi Pemerintahan

Tidak semua instansi pemerintah memiliki pegawai yang memiliki kompetensi kuat dalam akuntansi sektor publik. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengendalian internal, hingga penggunaan aplikasi keuangan berbasis teknologi. Keterbatasan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, termasuk potensi munculnya kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan, dan ketidaksesuaian dengan standar.

3. Perubahan Regulasi yang Dinamis

Regulasi terkait keuangan negara sering mengalami revisi atau pembaruan untuk menyesuaikan dengan tuntutan global dan dinamika ekonomi. Misalnya, perubahan Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah, revisi SAP, atau instruksi baru dari BPK dan Kementerian Keuangan. Perubahan ini menuntut instansi untuk selalu beradaptasi dan memperbarui kebijakan internal serta melatih SDM secara berkala. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan dan penilaian wajar atas laporan keuangan

4. Kualitas Data dan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi sektor publik kadang belum terintegrasi dengan baik. Banyak proses keuangan masih bersifat manual, sehingga rawan terjadi kesalahan, keterlambatan, dan risiko manipulasi data. Ketidakterpaduan data antarunit, perbedaan format pelaporan, serta kurangnya validasi data menjadi penyebab rendahnya kualitas informasi yang dihasilkan. Implementasi sistem berbasis elektronik seperti SIMDA, SAIBA, atau SIPD pun tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan kemampuan teknis antarinstansi.

5. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi yang Lebih Tinggi

Era modern menuntut sektor publik untuk semakin transparan dalam penggunaan anggaran. Masyarakat, lembaga pemeriksa, akademisi, dan media dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan pemerintah. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Tantangannya adalah memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar akurat, dapat dipercaya, dan tidak menimbulkan keraguan publik. Kesalahan kecil sekalipun dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas instansi pemerintah.

6. Koordinasi Antarlevel Pemerintahan

Sektor publik mencakup pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Setiap level memiliki tanggung jawab keuangan dan sistem pelaporan masing-masing. Koordinasi antarlevel sering kali menjadi kendala, terutama dalam proses konsolidasi data laporan keuangan. Perbedaan kapasitas administrasi dan perbedaan waktu pelaporan menyebabkan lamanya proses penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh dan menyulitkan pemantauan realisasi anggaran secara nasional.

7. Pengelolaan Aset yang Luas dan Beragam

Pemerintah memiliki aset dalam jumlah besar, tersebar di berbagai wilayah, dan terdiri atas berbagai jenis seperti tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, dan aset tak berwujud. Tantangan utama adalah memastikan seluruh aset tercatat dengan benar, terpelihara, dan memiliki nilai yang sesuai. Masalah umum yang muncul meliputi aset tidak ditemukan, aset belum disertifikatkan, perbedaan antara catatan fisik dan administratif, serta lemahnya inventarisasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan keuangan sektor publik merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga sebagai alat yang sangat penting bagi proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Melalui laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah dapat menunjukkan sejauh mana dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan sektor privat, karena melibatkan tujuan pelayanan publik, sumber pendanaan dari pajak, serta tuntutan transparansi yang lebih besar dari masyarakat. Meskipun demikian, implementasi laporan keuangan menghadapi berbagai tantangan.

3.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, pemerintah perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan terkait akuntansi pemerintahan dan penggunaan sistem informasi keuangan. Selain itu, integrasi dan pembaruan sistem informasi akuntansi harus terus dilakukan agar proses pelaporan lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Pengendalian internal juga perlu diperkuat guna mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh transaksi dicatat sesuai aturan. Pemerintah sebaiknya menyederhanakan regulasi pelaporan agar lebih mudah diterapkan oleh seluruh instansi, terutama di tingkat daerah. Terakhir, peningkatan transparansi kepada publik melalui penyediaan informasi keuangan secara terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 215–227.
- Alamsyah, S. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(10), 1–15.
- Anggraini, R. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(1), 45–56.
- Ardiyansyah, F. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(2), 150–160.
- Fitriani, H. (2019). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 4(2), 75–88.
- Hapsari, R. (2018). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–47.

STUDI KASUS

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Sejahtera bertanggung jawab atas program pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan kota, serta pengawasan pencemaran air. Pada tahun anggaran 2024, BPLH mengelola dana sebesar Rp120 miliar yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BPLH menjalankan beberapa program utama, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Hutan Kota dengan anggaran Rp45 miliar
2. Program Pengelolaan Sampah Terpadu dengan anggaran Rp50 miliar
3. Program Pengawasan Pencemaran Air dengan anggaran Rp25 miliar

Namun saat proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun, berbagai masalah muncul. Pertama, *dokumen pertanggungjawaban* dari tiga unit pelaksana teknis (UPT) tidak lengkap, terutama pada kegiatan pembelian bibit pohon dan sewa alat berat. Hal ini menyebabkan data realisasi anggaran tidak dapat direkonsiliasi secara langsung.

Selain itu, hasil pemeriksaan internal menunjukkan bahwa aset tetap berupa kendaraan operasional senilai Rp3,1 miliar belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) karena belum dilakukan verifikasi fisik. Akibatnya, nilai aset pada neraca tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Masalah berikutnya terjadi pada Laporan Arus Kas. Bendahara Pengeluaran mencatat kas keluar berdasarkan uang yang diberikan kepada UPT, bukan berdasarkan bukti penggunaan aktual. Hal ini menimbulkan selisih kas Rp87 juta saat proses rekonsiliasi akhir tahun dengan aplikasi keuangan daerah.

Staf penyusun laporan juga mengakui bahwa mereka masih kurang memahami *basis akrual* sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagian belanja masih dicatat berdasarkan kas keluar, bukan berdasarkan terjadinya kewajiban. Kondisi ini membuat Laporan Operasional (LO) tidak menggambarkan beban yang sebenarnya terjadi.

Situasi tersebut akhirnya menyebabkan BPLH mendapat catatan dari inspektorat bahwa laporan keuangan tahun 2024 belum memenuhi prinsip akuntabilitas, ketepatan waktu, dan penyajian wajar.

Soal :

1. Jelaskan dua permasalahan akuntansi utama yang menyebabkan laporan keuangan BPLH tidak dapat menyajikan informasi yang andal!
2. Berdasarkan kasus, mengapa selisih kas sebesar Rp87 juta bisa terjadi? Jelaskan penyebabnya dan bagaimana seharusnya pencatatan dilakukan sesuai SAP!
3. Sebutkan dua rekomendasi nyata yang dapat dilakukan BPLH untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya pada tahun anggaran berikutnya!